



LKPJ 2025

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI PAPUA**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	27
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Perbaikan Kedepan	30
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJ Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025 – 2029 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKJ Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Provinsi Papua,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Archives and Library of Papua. The stamp contains the text 'DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ACHMAD DJALALI,SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19680927 199610 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR – RI Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk mengeksplorasi dari mana dan sejauh mana Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dan tercapainya sasaran pada suatu kegiatan dan program.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharuskan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua untuk dapat melaksanakan tugas pokok secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

2. Menjadikan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Papua

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diantaranya :

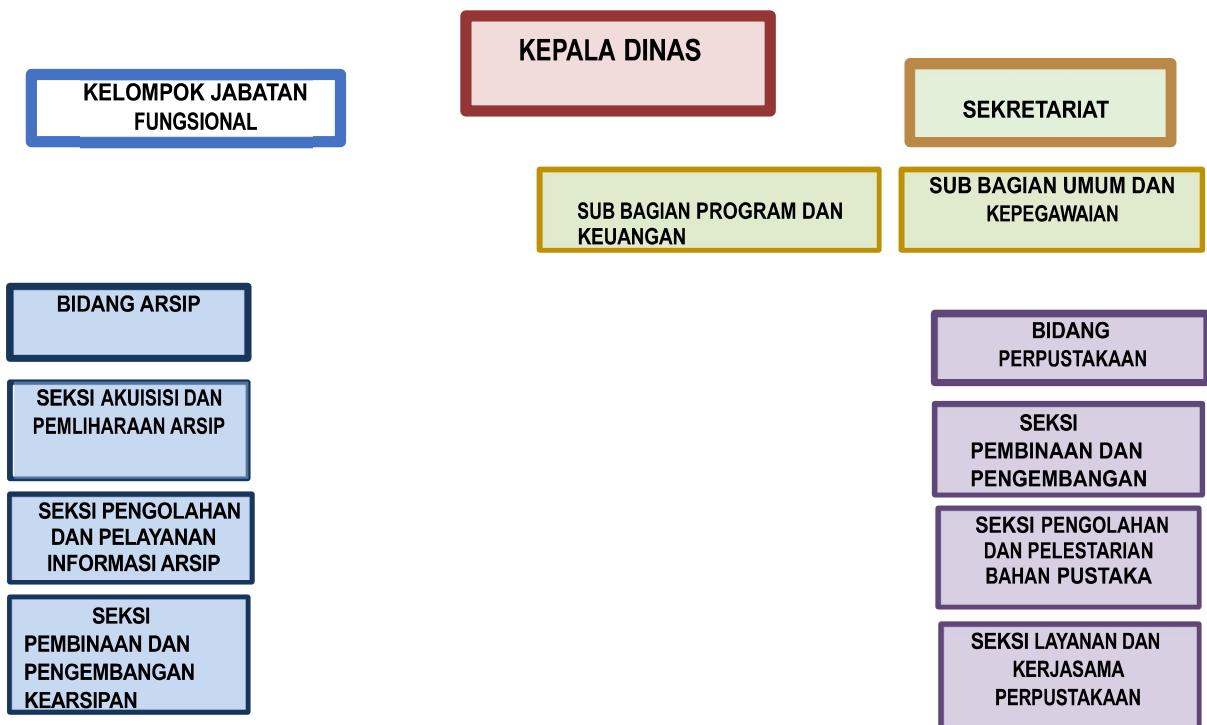
1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2. Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi masyarakat;
3. Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga banyak wilayah terpencil belum terlayani oleh mobil keliling perpustakaan.
5. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah daerah;
6. Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;

1.5. Uraian Singkat Struktur Organisasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Provisnisi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18) dan

Perturan Gubernur Papua Nomor 33 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua, Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua, adalah membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Susunan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Papua



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1. Telaan Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetapeksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi dan Misi Gubernur Papua Adalah :

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh Staf Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua. Visi dan Misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua adalah Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2024 - 2026.

- I. Misi Gubernur yang Kesatu "Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua"
 1. Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing;
 2. Sasaran Meningkatkan budaya baca pada Masyarakat;
 3. Stategi :
 - Peningkatan budaya baca Masyarakat;
 - Perluasan sarana perpustakaan.

- II. Misi Gubernur yang kedua "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik."
 - Tujuan Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public;

Strategi Meneruskan Reformasi Birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerja dan pertanggungjawaban public.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap isi dan misi Kepala Daerah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025– 2029 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Matriks, Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip	Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dan pencapaian target tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Menetapkan 4 Program , 18

Kegiatan dan 39 sub kegiatan pada Tahun 2025. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGAIATAN	SUBKEGIATAN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

				Perangkat Daerah	2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGAIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Binaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Binaan	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan

					<p>Standar Nasional Perpustakaan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>6. Pengembangan Perpustakaan Deposit</p> <p>7. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</p> <p>8. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</p> <p>9. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi</p> <p>10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan</p>
--	--	--	--	--	--

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGAIATAN	SUBKEGIATAN
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	<p>1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</p> <p>2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</p>
	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Nilai pengawasan kearsipan	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	<p>1. Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi</p> <p>2. Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis</p>

					<p>3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi</p>
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	1. Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
				Pengawasan kearsipan di provinsi	1. Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGAIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Nilai pengawasan kearsipan	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Sumber: Renja DAP Tahun 2025

2.1.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Mengembangkan berbagai jenis perpustakaan;
2. Arah kebijakan, Pemenuhan dasar kebutuhan sarana perpustakaan dengan Indikator Kinerja : Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah Target 300 kunjungan per hari;
3. Meningkatkan perbaikan system administrasi kearsipan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah serta peningkatan SDM kearsipan.

2.1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Arsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025 - 2029 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan
2.	Pengembangan Inovasi pelayanan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan Perpustakaan
3.	Pengembangan Inovasi Pengelolaan Kearsipan	Pengembangan pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan serta Pengawasan Tertib Arsip

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.4

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- Program Pembinaan Perpustakaan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		Sasaran Strategis	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJAH	ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						Rp 9.662.393.543
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Manejemen Internal perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RENJA, RKA, DPA Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 94.060.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	4	Rp 9.456.333.543
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasih Kepegawaian	Laporan	10	Rp 112.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ketercukupan Koleksi	Exempelar	6.795	Rp 8.824.032.820
			Pemerataan Layanan Perpustakaan	Perpustakaan	21	Rp 6.824.032.820
			Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Orang	55	Rp 650.000.000
2	Tingkat Gemar Membaca Masyarakat	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan Tingkat menengah dan pendidikan khusus	Lokus	4	Rp 2.000.000.000
			Jumlah Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah Provinsi Papua	Perpustakaan	20	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						Rp 2.179.675.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Jumlah Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Daftar	25	Rp 1.135.073.000
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Jumlah OPD yang mengelola SRIKANDI	OPD	5	Rp 350.000.000
	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu kembali	Arsip	100	Rp 320.000.000

	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi		Presentase Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	OPD	40	Rp 374.602.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
I.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Presentase Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Daftar	5000	Rp 250.000.000

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.670.933.363. Pada tabel berikut ditampilkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis.

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2025 Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN
5		10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 10.283.725.543
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 94.060.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.456.333.543
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 112.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 252.632.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 295.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 73.700.000
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 8.124.532.820
I	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 6.499.196.820
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.244.954.720
2	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Rp 593.664.000

3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp	513.045.280
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp	650.000.000
5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp	400.000.000
6	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Rp	974.032.820
7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp	239.900.000
8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp	600.000.000
9	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Rp	192.500.000
10	Penyusunan Data dan Informasih Perpustakaan	Rp	91.100.000
II	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp	1.625.336.000
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp	764.620.000
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp	860.716.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp	2.012.675.000
I.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp	1.055.073.000
1	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Rp	235.073.000
2	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Rp	420.000.000
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Rp	150.000.000
4	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Rp	250.000.000
II	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp	320.000.000
1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp	320.000.000
III	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp	335.000.000
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp	335.000.000
IV	Pengawasan kearsipan di provinsi	Rp	302.602.000
1	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Rp	302.602.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp	250.000.000
I.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp	250.000.000
1.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp	250.000.000
		Rp	20.670.933.363

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 57,45 dengan kategori tingkat akuntabilitas kinerja CC menunjukkan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua telah memiliki akuntabilitas kinerja cukup, namun masih memerlukan peningkatan signifikan dalam implementasi.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua yang meliputi empat komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Nilai terhadap masing-masing komponen kinerja tersebut di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	15,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			57,45
Predikat			CC

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Atau dengan kata lain pengukuran dilakukan dengan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap mencapai

target sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut :

Tabel : 3.2
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi pencapaian target indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua pada tahun 2025 dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJAH	REALISASI KINERJAH	Predikat
2	3	4	5	6	8
Meningkatnya Manejemen Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RENJA, RKA, DPA Perangkat Daerah	Dokumen	3	100%	Sesuai Target
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	4	100%	Sesuai Target
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasih Kepegawaian	Laporan	10	100%	Sesuai Target
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ketercukupan Koleksi	Exempelar	6.795	100%	Sesuai Target
	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Perpustakaan	21	100%	Sesuai Target
	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Orang	55	72,73%	Tidak Tercapai
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan Tingkat menengah dan pendidikan khusus	Lokus	4	100%	Sesuai Target
	Jumlah Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah Provinsi Papua	Perpustakaan	20	100%	Sesuai Target
Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Jumlah Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Daftar	25	100%	Sesuai Target
	Jumlah OPD yang mengelola SRIKANDI	OPD	5	100%	Sesuai Target
	Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu kembali	Arsip	100	100%	Sesuai Target
	Presentase Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	OPD	40	100%	Sesuai Target
	Presentase Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Daftar	5000	94,80 %	Tidak Tercapai

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Manejemen Internal perangkat Daerah sebesar 100%;
2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat capaian kinerja dengan indikator Persentase 91 %;
3. Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Provinsi 100%;
4. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan sebesar 99%.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 98 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi
Kinerja 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			2025		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai						
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Nilai	23,26	17,64	75,84	5025	5025	100
Meningkatnya Literasi Dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	71,30	50,86	71,33	71,33	50,86	71,30
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0,71	60,75	85,56	73,53	74,65	98,49

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	100	100	100
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	71,33	50,86	71,30
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	73,53	74,65	98,49

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua untuk tahun 2025 setelah Perda No.18 Tahun 2023 mengalami kenaikan dari pada target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya Kenaikan Anggaran dan pergeseran anggaran dari beberapa jenis pelaksanaan pembinaan perpustakaan serta didukung dengan adanya komitmen, kerjasama, koordinasi, sumber daya manusia yang kompeten

di bidang pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pelaksanaan peningkatan kualitas pembinaan perpustakaan dapat tetap berjalan sesuai target yang diinginkan.

i. Upaya-Upaya

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua untuk tahun 2025 sudah dapat terlihat hasil/angka/indeks dari pelaksanaan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025.
2. Peningkatan sumber daya pengelolaan arsip menuju digitalisasi Arsip

ii. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Beberapa hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Kegiatan terkait Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Minat baca masyarakat yang rendah merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja terkait penilaian Tingkat Kegemaran Membaca di Masyarakat;
- b. Saran dan prasarana yang masih kurang lengkap sebagai salah satu penunjang minat kunjungan ke perpustakaan meningkat;
- c. Bahan bacaan atau bahan Pustaka yang kurang lengkap dan kurang tepat yaitu masih kurangnya bahan bacaan atau bahan pustaka yang diminati dan up to date;
- d. Belum maksimalnya data-data perpustakaan, khususnya data perpustakaan sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Papua. untuk penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

iii. Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kinerja

Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan terus melakukan beberapa langkah – langkah perbaikan sehingga meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik, antara lain :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan cara melaksanakan kegiatankegiatan kegemaran membaca dan literasi;

2. Meningkatkan saran prasarana penunjang meningkatnya kunjungan ke perpustakaan. Lebih selektif dalam memilih bahan bacaan atau bahan Pustaka yang up to date;
3. Memaksimalkan pengumpulan data-data perpustakaan untuk penilaian IPLM;
4. Memaksimal Sumber daya Kearsipan yang ada guna memenuhi Tingkat ketersediaan arsip;
5. Penataan Arsip dilingkungan Pemerintah Provinsi papua.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

A. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya berikut Jumlah Pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua

Tabel 3.6

Klasifikasi ASN berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2025

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Aparatur Sipil Negara	67	66	133
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja	-	1	1
	JUMLAH	67	67	134

Sumber : Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan
Provinsi Papua Ket : Posisi Desember 2025

Tabel 3.7
Klasifikasi ASN berdasarkan Golongan
Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	9	8	17
2	Golongan III	27	44	71
3	Golongan II	30	15	45
4	PPPK		1	1
	JUMLAH			134

Sumber : Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi
Papua Ket : Posisi s/d Bulan Agst 2025

Tabel 3.8
Klasifikasi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	3	1	4
2	Strata 1	26	48	74
3	Diploma 4	-	-	0
4	Diploma 3	1	3	4
5	Diploma 2	-	2	2
6	Diploma 1	-	-	0
7	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	32	17	49
8	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	1	-	1
9	Sekolah Dasar/Sederajat	-	-	0
	JUMLAH			134

Sumber : Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi
Papua Ket : Posisi s/d Bulan Agst 2025

Tabel 3.9
Klasifikasi PTT-PK berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 1	-	1	1
2	Diploma 3	-	-	0
3	Sekolah Menengah Atas/Sederajat			
	JUMLAH			1

Sumber : Dinas Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi
Papua Ket : Posisi s/d Bulan Agst 2025

Tabel 3.10
Klasifikasi ASN berdasarkan Jabatan
Tahun 2025

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Struktural	52	40	92
	Fungsional	13	29	42
2	Pustakawan Utama			
3	Pustakawan Madya	4	7	11
4	Pustakawan Muda	5	6	11
5	Pustakawan Pertama	1	2	3
6	Pustakawan Penyelia	-	2	2
7	Pustakawan Mahir	-	3	3
8	Pustakawan Terampil			
				30
9	Arsiparis Madya			-
10	Arsiparis Muda	1	3	4
11	Arsiparis Pertama	2	6	8
12	Arsiparis Penyelia			
13	Arsiparis Terampil			
				12
14	Analisis Kebijakan Muda			
15	Perencana Muda			
16	Analisis SDMA Pertama			
17	Pranata Komputer Pertama			
18	Statistisi Pertama			
	Pelaksana			
19	Operator Layanan Operasional			
20	Penelaah Teknis Kebijakan			
21	Pengadministrasian Perkantoran			

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua
Ket : Posisi s/d Bulan Agst 2025

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

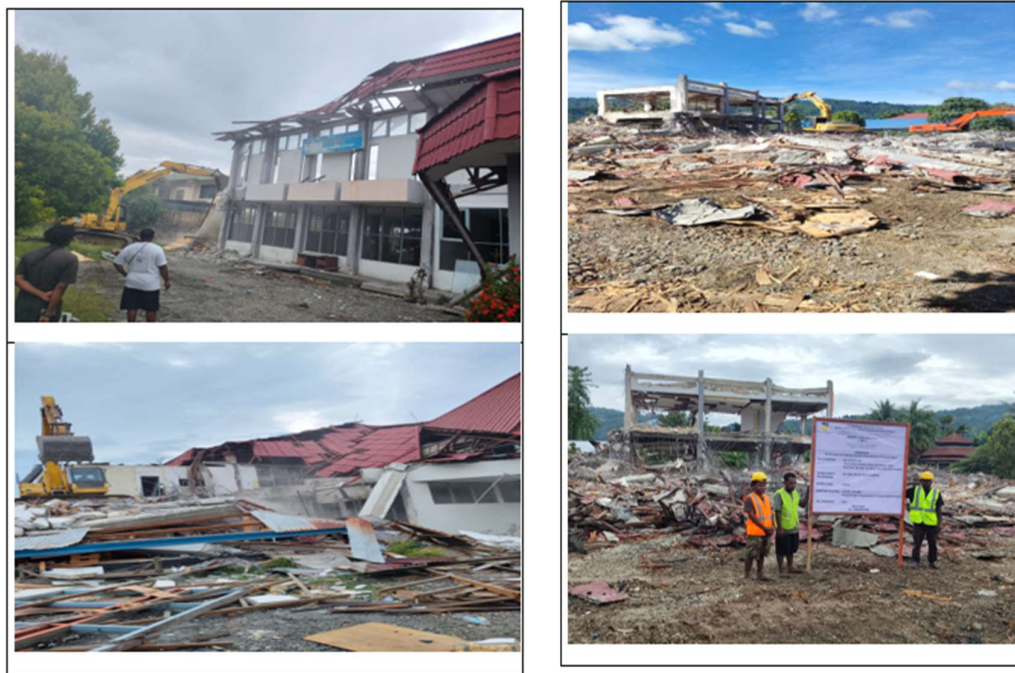
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 94,060,000. Anggaran pada Kegiatan ini diperuntuhkan untuk penyusunan Dokumen berupa RENJA, RKA, TP2K dan Laporan Kinerja dalam Honorarium, Belanja ATK dan Belanja Cetak. Realiasi Anggaran Pada Kegiatan ini Rp. 93,690,000
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 9.456.333.543. Anggaran Pada Sub Kegiatan ini diperuntuhkan untuk pembayaran Gaji dan TPP Pegawai.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 112.000.000. Anggaran Pada Sub Kegiatan ini diperuntuhkan untuk Transport untuk pengurusan berkas kenaikan pangkat dan kenaikan Jabatan Fungsional.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 252.632.000. Anggaran Pada Sub Kegiatan ini diperuntuhkan untuk Bahan logistic kantor berupa pengurusan Jatah beras pegawai, Cetakan dan komponen instalasi Listrik serta rapat koordinasi dan konsultasi.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi dana Rp. 295.000.000. Anggaran Pada Sub Kegiatan ini diperuntuhkan untuk Kebutuhan Operasional kantor berupa Air, Lisrik Internet.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi dana Rp. 73.700.000. Anggaran Pada Sub Kegiatan ini diperuntuhkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan pengurusan perijinan kendaraan operasional Dinas.

II. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.499.196.820 dibagi menjadi sub kegiatan :
 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 600.000.000 dipergunakan pemeliharaan Website dan Otomasi, bantuan Komputer, Printer, Bantuan Starlink ke 20 Perpustakaan yang dikelola

Masyarakat di kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Biak Numfor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 599.568.450 atau 99,93%;

2. Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.244.954.720 dipergunakan untuk belanja Pemeliharaan Gedung Layanan Sementara Otonom, Pembongkaran Gedung Layanan Perpustakaan Kotaraja, penggantian lampu penerangan bangunan kantor, Perencanaan Gedung Layanan yang Baru, Mobilisasi Barang ke Gedung Layanan sementara dan Kantor secretariat yang berlokasi di Entrop. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.228.259.702 atau 99,21%;



3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 593.664.000 dipergunakan untuk perbaikan dan mencetak kembali koleksi langka sebanyak serta pelaksanaan workshop Perlindungan dan pelestarian naskah kuno dan Koleksi Langka. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 592.895.525. atau 99,87%;
4. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah di seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. dengan alokasi dana sebesar Rp. 513.045.280 dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan pada lembaga pendidikan di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 512.345.280 atau 99,86%;

Dokumentasi Bimtek Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Suroboyo



Dokumentasi Bimtek Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Jayapura



5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 650.000.000 dipergunakan untuk pelaksanaan Uji Kopentensi bagi Pustakawan, bimtek tenaga pengelola perpustakaan bagi Tenaga Teknis Perpustakaan di Provinsi Papua, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 643.063.000 atau 98,93%;

Dokumentasi:

1. Dokumentasi pelaksanaan Uji kompetensi alih Jabatan Fungsional dan alih jabatan lainnya ke perpustakaan, Peserta 22 orang lulus bersertifikasi 18 orang

Dokumentasi pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan bersertifikat Nasional, bagi tenaga perpustakaan.



6. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi. dengan alokasi dana sebesar Rp. 192.500.000 dipergunakan untuk pendampingan langsung ke 30 Perpustakaan Khusus di wilayah Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura 15 Perpustakaan dan Kabupaten 15. Adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 192.500.000 atau 100%;
 7. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000 dipergunakan untuk peningkatan layanan rujukan melalui pengadaan buku koleksi Rujukan dengan target 4 Layanan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 389.999.783 atau 97,5%;
 8. Pengembangan Deposit dengan alokasi dana sebesar Rp. 974.032.820 dipergunakan untuk pengadaan bahan pustaka untuk bantuan 14 perpustakaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 967.545.720 atau 99,93%;
 9. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.100.000 dipergunakan untuk mencari data dan informasi perpustakaan dan pengelola perpustakaan dan lain-lain. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 83.600.000 atau 91,77%.
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp 923.320.930 dibagi menjadi sub kegiatan :
1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 764.620.000 dipergunakan untuk pelibatan sosialisasi gemar pada satuan pendidikan menengah/khusus melalui lomba bertutur/pidato, di wilayah kota jayapura, lomba mewarnai gambar bagi Paud dan TK, Layanan Perpustakaan di tempat-tempat Umum (POCADI) dan biaya pendukung operasionalnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 760.790.000 atau 99,5%.



3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp.223.086.400. digunakan untuk monitoring perkembangan Literasi berbasis inklusi sosial dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada 6 perpustakaan yang dikelola masyarakat di wilayah kabupaten Jayapura melalui peningkatan SDM pengelola perpustakaan (Bimtek Pengelolaan Sasaran Pembangunan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi) Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 222.486.400 atau 99,73%.



III. Program Pengelolaan Arsip, dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.055.073.000 dengan sub kegiatan :
 1. Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi alokasi dana sebesar Rp. 235.073.000 dipergunakan untuk Alih Media Dokumen Arsip sebanyak 120 dokumen arsip. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 234.158.000 atau 99,61%;
 2. Penciptaan dan pemeliharaan Arsip Dinamis dengan alokasi dana sebesar Rp. 420.000.000 dipergunakan untuk penyusunan Daftar Arsip Dinamis sebanyak 5000 dokumen arsip. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 419.626.548 atau 99,91%;
 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000 dipergunakan belanja cetakan sekat arsip dan MAP Folder sebanyak 5 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 149.696.160 atau 99,8%;
 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000 dipergunakan belanja cetakan sekat arsip dan MAP Folder sebanyak 5 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 149.696.160 atau 99,8%;
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 320.000.000 Kegiatan ini digunakan untuk Pengelolaan dan akuisisi arsip pada OPD yang dibubarkan/bergabung, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis Provinsi dengan target 100 Dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 314.914.100 atau 98,41%;
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.000.000 dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang digunakan untuk pembinaan Aplikasi Srikandi di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Supiori. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 334.900.040 atau 99,97%.

d. Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi Alokasi Anggaran Rp. 302.602.000 kegiatan mencakup pengawasan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan dan Penataan Arsip di 41 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dengan Realisasi Anggaran Rp. 294.865.400.

IV. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan kegiatan :

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000 dengan sub kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Penetapan, dan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan alokasi dana sebesar Rp 250.000.000 digunakan untuk penilaian dan pemusnahan arsip. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 247.150.000 atau 98,86%.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 98,78 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PRESENTASE	
1	5	10	11	15	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 94.060.000	Rp 93.690.000	99,61
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.456.333.543	Rp 9.392.259.809	99,32
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	100
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 252.632.000	Rp 252.546.000	99,97
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 295.000.000	Rp 225.946.063	76,59

	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 73.700.000	Rp 57.700.000	78,29
	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
	I	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 6.499.196.820	Rp 6.448.039.781	99,21
	1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.244.954.720	Rp 2.228.259.702	99,26
	2	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Rp 593.664.000	Rp 592.895.525	99,87
	3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 513.045.280	Rp 512.345.280	99,86
	4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 650.000.000	Rp 643.063.000	98,93
	5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 400.000.000	Rp 389.999.783	97,5
	6	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Rp 974.032.820	Rp 967.545.720	99,33
	7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp 239.900.000	Rp 238.262.321	99,32
	8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 600.000.000	Rp 599.568.450	99,93
	9	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Rp 192.500.000	Rp 192.500.000	100
	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp 91.100.000	Rp 83.600.000	91,77
	II	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.625.336.000	Rp 1.574.714.560	96,89
	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 764.620.000	Rp 760.790.000	99,5
	2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 860.716.000	Rp 813.924.560	94,56
	3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
	I.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Rp 1.055.073.000	Rp 1.053.354.108	99,84
	1	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Rp 235.073.000	Rp 234.158.000	99,61

	2	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Rp 420.000.000	Rp 419.626.548	99,91
	3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Rp 150.000.000	Rp 149.696.160	99,8
	4	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Rp 250.000.000	Rp 249.873.400	99,95
	II	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Rp 320.000.000	Rp 314.914.100	98,48
	1	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp 320.000.000	Rp 314.914.100	98,41
	III	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Rp 335.000.000	Rp 334.900.040	99,97
	1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp 335.000.000	Rp 334.900.040	99,97
	IV	Pengawasan kearsipan di provinsi	Rp 302.602.000	Rp 294.865.400	97,44
	1	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Rp 302.602.000	Rp 294.865.400	97,44
	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
	I.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp 250.000.000	Rp 247.150.000	98,86
	1.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Rp 250.000.000	Rp 247.150.000	98,86
Total Realisasi					98,78

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

LKPJ ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua tahun 2025 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2025 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2025.

Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Secara umum capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 rata-rata sebesar 98 %.

4.2. Saran

Ke Depan Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi, program anggaran, keuangan dan aset pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
2. Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Arsip Perangkat Daerah yang efektif dan Efisien;
3. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembangunan Literasi Masyarakat terhadap perpustakaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Provinsi Papua,



ACHMAD DJALALI, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19680927 199610 1 003

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (Iku) Skpd 2024-2026
2. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2025
3. Jenis Penghargaan Yang Diterima/Diperoleh Skpd Di Tahun 2025